

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling mendasar dalam siklus kehidupan manusia mulai lahir hingga akhir hayat (*long life education*). Secara konsep, pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan adalah suatu proses *transfer of knowledge* (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni) yang dilakukan oleh guru kepada anak didiknya. Selain itu, pendidikan adalah alat untuk merubah cara berpikir manusia dari cara berpikir tradisional ke cara berpikir ilmiah (modern).

Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia, utamanya mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana minimal berupa gedung sekolah yang layak, hingga sampai pada ketersediaan berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya (Utomo, 2010: 2). Selain ketersediaan sarana dan prasarana fisik dan berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya yang masih terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kurikulum pendidikan dasar pun menjadi permasalahan. Kurikulum yang seringkali berubah seiring dengan pergantian rezim pemerintahan menyebabkan anak-anak usia sekolah

dasar menjadi korbannya. Anak-anak usia sekolah dasar merupakan anak-anak yang *mind set* berfikirnya belum terbentuk, anak-anak tersebut masih dalam tahap amati dan tiru, belum sampai tahap modifikasi. Selain itu, beban kurikulum yang berat menyebabkan anak-anak kehilangan kreativitasnya karena hanya dibebani dengan mata pelajaran yang terkonsep dan berpola baku secara permanen. Artinya, apa yang didapat di sekolah, itulah yang ada pada dirinya, tanpa kecuali.

Pemerintah dalam menangani permasalahan pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan dasar 12 tahun dirasakan masih belum tuntas. Hal tersebut dibuktikan dengan setiap bergantinya rezim pemerintahan, utamanya dengan bergantinya menteri pendidikan, selalu diikuti dengan bergantinya kurikulum pendidikan. Dari sini tampak bahwa pemerintah masih belum menemukan bentuk pengelolaan pendidikan yang tepat bagi anak-anak kategori usia pendidikan dasar dan masih mencari-cari bentuk yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni.

Kualitas pendidikan dasar di Indonesia saat ini masih menempati urutan bawah untuk negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik (UNESCO, 2009). Peran pemerintah sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas pendidikan anak, utamanya kualitas pendidikan dasar sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan ayat (2) “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar tersebut adalah melaksanakan program *regrouping*. *Regrouping* merupakan penggabungan

beberapa Sekolah Dasar (SD) menjadi satu dalam rangka efisiensi anggaran pendidikan dan efektifitasnya untuk meningkatkan mutu pendidikan, atau merupakan usaha penyatuan dua unit SD atau lebih menjadi satu kelembagaan atau institusi dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan (Susanto, 2010: 1).

Regrouping dilaksanakan sesuai dengan Surat Nomor 421.2/2501/Bangda/1998 tentang pedoman pelaksanaan penggabungan (*regrouping*) sekolah dasar. Tujuan penggabungan tersebut adalah untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga guru, peningkatan mutu, efisiensi biaya bagi perawatan gedung sekolah dan sekolah yang ditinggalkan dimungkinkan penggunaannya untuk rencana pembukaan SMP kecil/SMP kelas jauh atau setara sekolah lanjutan sesuai ketentuan setempat untuk menampung lulusan sekolah dasar.

Tujuan penggabungan tersebut sangat bagus, misalnya sarana atau gedung yang ditinggalkan dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan SMP kecil atau SMP kelas jauh. Disamping itu, langkah ini juga sekaligus untuk mensukseskan program belajar 9 tahun. Efisiensi ini dengan kasat mata dapat dilihat bahwa untuk penyelenggaraan SD sebagaimana dimaksud, pemerintah atau masyarakat tidak perlu mempersiapkan lahan, dan gedung serta fasilitas lainnya untuk sebuah investasi. Secara teoritik melalui kebijakan penggabungan (*regrouping*) pemerintah dapat menambah jumlah SMP, atau pemerintah juga dapat memperoleh pendapatan atas sewa gedung (SD yang digabung), dan juga efisien dalam membiayai SMP kecil/ SMP jarak jauh, sehingga alokasi tersebut dapat dialokasikan untuk keperluan sektor lainnya.

Regrouping memberikan angin segar, memberikan sesuatu yang sifatnya positif. Paling tidak, sekolah hasil *regrouping* memiliki sumber daya yang lebih

besar. Ini adalah potensi yang hebat bagi pengembangan sekolah selanjutnya. Harapannya, di bawah kepemimpinan seorang kepala sekolah, sumber daya yang ada tersebut dapat dikelola dengan lebih baik dan benar-benar menjadi kekuatan baru bagi kemajuan sekolah yang bersangkutan. Dengan kata lain, manajemen lebih efektif dan efisien sehingga memberikan dampak positif bagi kemajuan sekolah ke depan. Selain dampak positif dari program *regrouping* sebagaimana disebutkan di atas, *regrouping* ternyata memunculkan persoalan baru. Dua sekolah atau lebih, yang berlatar belakang berbeda, dengan sarana prasarana berbeda, dengan tujuan berbeda di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang berbeda, yang dulunya bersaing dalam bekerja untuk mendapatkan simpati masyarakat pengguna jasa mereka, harus melebur menjadi satu dengan kepemimpinan seorang kepala sekolah yang baru.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, memasuki tahun ajaran baru 2018/2019, terdapat beberapa Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Ponorogo ditutup dan digabung oleh Dinas Pendidikan (Dindik). Alasan di balik kebijakan tersebut menurut Kepala Dindik Ponorogo Tutut Erliana adalah "Kami kekurangan murid. Selain itu, tidak adanya rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS), makanya kami lakukan perampingan," tutur Kepala Dindik Ponorogo Tutut Erliana (detikcom, Selasa, 17/7/2018). Untuk tahun ajaran baru 2018/2019, Dindik mencatat ada 8 SD di Ponorogo yang ditutup, yaitu SDN 1 Karangpatihan, SDN 1 Carat, SDN 2 Bangunsari, SDN 2 Surodikraman, SDN 3 Singgahan, SDN 1 Tajuh, SDN 2 Sooko, dan SDN 2 Gegeran.

Ada pula 9 SD yang di-*regrouping* atau digabung dengan SDN lainnya, yaitu SDN 1 Purwosari, SDN 2 Japan, SDN 2 Singosaren, SDN 1 Keniten, SDN 2 Plunturan, SDN 2 Karanglo Lor 1, SDN 1 Ngasinan, SDN 3 Sumoroto dan

SDN 2 Duri. Jika tidak dilakukan perampingan, lanjut Tutut, maka akan terjadi pemborosan uang negara. "Anak-anak kan bisa masuk dan gabung ke sekolah terdekat atau yang dituju. Daripada jumlahnya sedikit mending gabung sama sekolah lain". Tutut menambahkan ia bakal membuat Surat Keputusan (SK) penutupan usai semua siswa dipindahkan ke sekolah lain. "Kalau siswa sudah pindah, kami bakal mengajukan surat penutupan". Bagi Tutut, sebelum melakukan penutupan pihaknya pun telah meminta wali murid untuk segera memindahkan anaknya ke sekolah lain. "Kami pun mengimbau para orang tua untuk segera memindahkan anaknya, supaya bisa segera sekolah seperti biasa," pungkasnya (detikcom, Selasa, 17/7/2018).

Berangkat dari uraian di atas, maka penulis mencoba untuk mengkaji masalah regrouping tersebut dalam skripsi berjudul: Analisis Kebijakan Regrouping Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Karanglo Lor Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan masalah pokok sebagai berikut: Bagaimanakah Kebijakan Regrouping Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Karanglo Lor Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui Kebijakan Regrouping Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Karanglo Lor Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo

Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan keilmuan dalam ilmu manajemen pendidikan, khususnya terkait pelaksanaan *regrouping* di sekolah dasar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis kepada.

- a. Bagi Dinas Pendidikan sebagai bahan masukan dalam merumuskan *regrouping* di sekolah dasar.
- b. Bagi Kepala Sekolah, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran dan sarana prasarana setelah *regrouping* dalam upaya pencapaian hasil belajar yang maksimal.
- c. Bagi guru dijadikan sebagai bahan perbandingan dan bahan tambahan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran.
- d. Bagi Komite sekolah, hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi komite sekolah dalam memberikan masukan kepada sekolah.
- e. Bagi warga sekolah, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk lebih berperan aktif setelah *regrouping*.

E. Penegasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

2. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

3. Regrouping

Pada dasarnya *Regrouping* adalah suatu keputusan untuk mengkombinasikan/ menggabungkan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru.

4. Sekolah Dasar

Sekolah Dasar (disingkat SD) adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah Dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Pelajar Sekolah Dasar umumnya berusia 6-12 tahun. Di Indonesia, setiap warga negara berusia 6-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni Sekolah Dasar (atau sederajat) 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat) 3 tahun.

F. Landasan Teori

1. Regrouping

a. Pengertian Regrouping

Regrouping dapat diartikan sebagai pengelolaan (*reorganizing*) bentuk dari kelompok-kelompok. Penggabungan merupakan kata lain dari

Regrouping yang biasanya terjadi di kalangan perusahaan profit seperti dalam dunia usaha perbankan. Definisi *Regrouping* berasal dari kata *merge* (memfusikan/menggabungkan). Menurut Black dalam Wibisono (2006:19) mengemukakan *Regrouping* dalam dunia perusahaan adalah “*Regrouping is absorption of one company by another, latter retaining its own name and identity and acquiring assets, liabilities, franchises, and powers of former and absorbed company ceasing to exist as separate business entity.*”

Regrouping atau penggabungan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dengan sama-sama meninggalkan nama lama dan mengakuisisi aset, cadangan dan kekuasaan-kekuasaan lama kemudian diserap untuk mendirikan suatu usaha baru. Penggabungan atau *Regrouping* didefinisikan oleh Pringle dan Harris (Samosir, 2003: 4) sebagai berikut: “*Regrouping is combination of two or more firm in which one company survives under its own name while any others cease to exit as legal entities*” Pada dasarnya *Regrouping* adalah suatu keputusan untuk mengkombinasikan/ menggabungkan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru. Dalam konteks bisnis, *Regrouping* adalah suatu transaksi yang menggabungkan beberapa unit ekonomi menjadi satu unit ekonomi yang baru. Proses *Regrouping* umumnya memakan waktu yang cukup lama, karena masing-masing pihak perlu melakukan negosiasi, baik terhadap aspek-aspek permodalan maupun aspek manajemen, sumber daya manusia serta aspek hukum dari perusahaan yang baru tersebut.

Penggabungan dilakukan secara drastis yang dikenal dengan akuisisi atau pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Menurut

Ruru (Wibisono, 2006: 2) mendefinisikan *Regrouping* sebagai penggabungan usaha dari dua atau lebih perusahaan yang pada akhirnya bergabung kedalam salah satu perusahaan yang telah ada sebelumnya. Sementara Wibisono (2006: 2) mendefinisikan *Regrouping* sebagai penggabungan dua badan usaha yang relatif berimbang kekuatannya, sehingga terjadi kombinasi yang saling membantu.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut di atas, maka dapat dikemukakan pengertian penggabungan atau *Regrouping* merupakan suatu penyatuan perusahaan yang melibatkan dua pihak yaitu yang menerima penggabungan dan perusahaan yang menggabungkan diri.

b. Konsep *Regrouping*

Penggabungan sekolah (*regrouping*) yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan Sekolah (*regrouping*) Sekolah Dasar (SD) pada tanggal 16 November 1998 kepada Gubernur Seluruh Indonesia yaitu: a) Penggabungan (*regrouping*) SD adalah usaha penyatuan dua unit SD atau lebih menjadi satu kelembagaan (institusi) SD dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan; b) Lingkup penggabungan SD meliputi SD yang terdapat antar desa/kelurahan yang sama dan atau di desa/kelurahan yang berbatasan dan atau antar kecamatan yang berbatasan; c) Sekolah Dasar kemudian disingkat dengan SD adalah bentuk satuan pendidikan dasar milik pemerintah yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun; d) SD inti adalah SD yang terpilih antara beberapa SD dalam satu gugus sekolah yang berfungsi sebagai pusat pengembangan di dalam gugus SD tersebut; e) SD imbas adalah anggota satu gugus sekolah yang menjadi binaan SD inti; f) SD kecil adalah SD di

daerah terpencil yang belum memenuhi syarat pembakuan.

Program *regrouping* sekolah pada awalnya dilakukan pada sekolah yang mengalami kekurangan siswa, sehingga dibutuhkan adanya *regrouping* sekolah. Namun untuk saat ini *regrouping* sekolah dilakukan bukan karena kekurangan siswa namun tujuan penyatuan tiga atau empat SD menjadi satu kepala sekolah (kepsek), terutama yang lokasinya berada dalam satu kawasan adalah efisiensi anggaran berupa tunjangan jabatan, selain itu juga untuk menghemat alokasi tunjangan kinerja daerah (TKD) kepsek sebab TKD kepsek lebih besar dari pada guru (Bataviase, 2010: 1).

Pelaksanaan penggabungan sekolah dasar berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Kep.MENDIKNAS No. 062/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pedoman pendirian sekolah Bab VI:
 - a) Pasal 33 ayat 1 pengintegrasian sekolah yang merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih sekolah yang sejenis menjadi satu sekolah.
 - b) Pasal 24 perihal persyaratan pengintegrasian sekolah
- 2) Lampiran Kep. MENDIKNAS No. 207/U/2003 tentang kebijakan Departemen Pendidikan Nasional perihal kebijakan umum poin ketiga yaitu meningkatkan efisiensi pembiayaan pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas, sarana prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan melibatkan semua partisipasi dan peran serta masyarakat, serta melakukan advokasi dalam memberdayakan masyarakat dalam pembangunan, pengembangan dan atau penyelenggaraan pendidikan, dan poin keempat yaitu

meningkatkan daya tampung, serta mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.

Penggabungan sekolah dasar merupakan salah satu cara untuk pengelolaan sekolah yang lebih baik. Pengelolaan sekolah merupakan proses menempatkan sekolah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan menyangkut visi, misi dan tujuan sekolah yang membawa implikasi terhadap pengembangan kurikulum dan program-program operatif sekolah. Menurut Mortimore (1991: 9) pengembangan sekolah berkaitan dengan efektivitas sekolah yang didefinisikan seperti berikut: *one in which pupils progress further than might be expected from consideration of its intake. Whilst this definition provides the basis for conceptualizing school effectiveness studies and indeed for designing an appropriate methodology for school comparisons, some further points concerning effectiveness need to be made.*

Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa pengelolaan sekolah merupakan proses pemberdayaan atau memajukan siswa secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kekuatan *input* pendidikan yang digunakan. Pengelolaan sekolah memberikan suatu basis mengenai konseptualisasi efektivitas sekolah dan untuk mendesain metodologi yang sesuai untuk perbandingan sekolah dengan beberapa poin mengenai efektivitas yang perlu dibuat. Hal itu juga didukung oleh Walle (2004: 1) bahwa dengan *regrouping* dapat mengefektifkan pembelajaran seperti dikemukakan berikut:

“Project in order to seek out more effective instructional strategies,

activities, and curricula in the hope of helping students more easily and more deeply, understand the skills involved in solving mathematical problems which require regrouping”.

Regrouping merupakan suatu proyek dalam rangka untuk mencari strategi instruksional yang efektif, kegiatan, dan kurikulum dengan harapan dapat membantu siswa lebih mudah dan lebih dalam, memahami keterampilan yang terlibat dalam memecahkan masalah matematika sehingga membutuhkan adanya penggabungan.

Menurut Cotton, (1992: 8) mendefinisikan pengelolaan sekolah sebagai *“a school improvement impetus and authority emanating from outside the school does not produce the responsibility and commitment necessary to sustain consequential improvement.”* Definisi tersebut menjelaskan bahwa pengembangan sekolah merupakan suatu daya dorong dan otoritas yang berasal dalam sekolah menghasilkan tanggung jawab dan komitmen yang diperlukan untuk mendukung pengembangan dari waktu ke waktu. Menurut Cotton, (1992: 19) pengembangan sekolah membutuhkan pengawasan yang disesuaikan dengan kinerjanya seperti berikut:

“The more control a school has over those aspects of its organization that affect its performance, the articulation of its goals, the selection and management of its personnel, the specification of its policies, the more likely a school is to exhibit the qualities that have been found to promote effectiveness”.

Definisi tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan pada sebuah sekolah didasarkan atas aspek-aspek yang mempengaruhi kinerja sekolah, tujuan yang dinyatakan untuk dicapai, seleksi dan pengelolaan sumber daya manusianya, spesifikasi kebijakan- kebijakan dan yang lainnya yang dapat menunjukkan kualitas yang dapat dijumpai untuk memperkenalkan

efektivitas.

Pengembangan sekolah penting dilaksanakan melalui analisis situasional yang akurat dan seksama, mengenali kebutuhan, perubahan penghargaan secara jelas, strategi komunikasi secara efektif, penguatan perubahan dan institusional, dan dukungan perubahan sumber daya. Pengembangan sekolah dapat mencapai total mutu. Peningkatan mutu secara terus menerus menunjukkan pengembangan yang berkelanjutan. Pengembangan sekolah merupakan segenap aktivitas atau program kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan untuk meningkatkan beberapa aspek sekolah yang menyangkut pelaksanaan dan operasional di kelas kemudian berdampak pada peningkatan prestasi belajar siswa serta tingkat efektivitas sekolah. Pengembangan sekolah juga dapat diartikan sebagai segenap program kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan untuk meningkatkan mutu sekolah.

Berdasarkan definisi dari beberapa tokoh tersebut, penggabungan sekolah dasar atau *regrouping* merupakan satu cara pengembangan sekolah dengan memberdayakan dan mengembangkan berbagai sumber daya pendidikan untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan dan efektivitas sekolah.

c. Tujuan *Regrouping*

Dalam pedoman pelaksanaan penggabungan (*regrouping*) sekolah dasar, dimaksudkan sebagai garis besar acuan bagi instansi yang berwenang melakukan penggabungan SD, dan bertujuan agar kegiatan penggabungan SD dan prosesnya berlangsung secara efektif dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam surat yang dikeluarkan oleh

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia perihal tentang pelaksanaan penggabungan (*regrouping*) dalam petikan suratnya yang berbunyi kegiatan penggabungan (*regrouping*) ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan guru, peningkatan mutu, efisiensi biaya bagi perawatan gedung sekolah, dan sekolah yang ditinggalkan dimungkinkan penggunaannya untuk rencana pembukaan SMP kecil/ SMP kelas jauh atau setara dengan sekolah lanjutan sesuai dengan kebutuhan setempat untuk menampung lulusan SD.

Menurut Suparlan (2006: 34) tujuan *regrouping* antara lain: (a) Ingin meningkatkan mutu layanan pendidikan untuk masyarakat. Dalam arti layanan pendidikan yang bermutu. Bukan hanya layanan pendidikan dengan gedung sekolah yang seadanya; (b) Untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Dengan beberapa sekolah yang terdapat dalam satu kompleks gedung sekolah yang sempit menimbulkan indikasi terjadinya proses persaingan yang tidak sehat antara sekolah yang satu dengan yang lain.

c. Langkah-Langkah *Regrouping*

Langkah-langkah *regrouping* atau *Regrouping* sekolah menurut Suparlan (2006: 6) adalah sebagai berikut.

- 1) Mengadakan sosialisasi kebijakan *Regrouping* sekolah kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Langkah pertama ini dilakukan agar para pemangku kepentingan memiliki pemahaman mendalam tentang manfaat *Regrouping* bagi semua pihak, terutama bagi peserta didik. Dalam kegiatan ini, kita dapat menyerap aspirasinya, keberatan-keberatannya, dan jika perlu apa peran yang dapat di sumbangkan untuk

ikut bersama membangun sekolah yang lebih maju. Inisiatifnya sudah barang tentu harus dari kepala sekolah. Kalau tidak juga muncul, dapat dari dinas pendidikan tingkat kecamatan atau bahkan tingkat kabupaten. Sudah barang tentu harus dipahami bahwa sosialisasi bukanlah instruksi, bukan pula pemaksaan terselubung. Benar-benar untuk meningkatkan pemahaman secara kritis tentang manfaat kebijakan *Regrouping* sekolah sebagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

- 2) Jika langkah pertama terdapat respon yang masih negatif, maka strategi lain dapat dilakukan, misalnya mengadakan pendekatan dengan para tokoh masyarakat atau tokoh agama, atau tokoh-tokoh pendidikan yang ada di daerah tersebut. Jika langkah ini dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka langkah berikutnya adalah membentuk tim atau kepanitiaan, dengan melibatkan komponen yang terkait. Pembentukan tim atau kepanitiaan ini pun harus dilakukan secara demokratis agar semua *stakeholders* dapat terakomodasi aspirasinya, dan yang lebih penting adalah agar dapat memberikan peran sertanya secara maksimal dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 3) Mengajukan atau memasukkan program *Regrouping* sekolah ke dalam program dan kegiatan dinas pendidikan, untuk disetujui oleh pemerintah dan legislatif. Langkah ini penting, karena program *Regrouping* akan memerlukan konsekuensi anggaran yang mungkin tidak sedikit.
- 4) Jika program itu telah disepakati, maka langkah berikutnya adalah pelaksanaan program. Fase pelaksanaan program dan monitoring pelaksanaan program juga harus selalu melibatkan semua *stakeholder*

yang sejak awal dilibatkan dalam program ini. Program ini harus dilaksanakan menurut prinsip manajemen modern, yakni demokratis, transparan, dan akuntabel. Jika tidak, maka justru akan terjadi *distrust* dari masyarakat, yang untuk membangunnya tidaklah mudah.

- 5) Pelaporan dan pertanggungjawaban jika program itu telah dapat diselesaikan. Di samping itu, kegiatan pasca pelaksanaan program perlu dilakukan, misalnya monitoring dampak pelaksanaan program tersebut terhadap peningkatan mutu pendidikan, sebagaimana telah disebutkan dalam tulisan ini, yakni lima dimensi mutu pendidikan yakni: *learners, environments, content, processes*, dan *outcomes* atau peserta didik, lingkungan, kurikulum atau bahan ajar, proses pendidikan atau proses pembelajaran, dan hasil pendidikan atau hasil belajar peserta didik.

d. Indikator Regrouping

Kriteria Indikasi Regrouping Sekolah Dasar Peningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar pendidikan dasar dengan cara mengadakan program penggabungan sekolah, yaitu dengan menggabungkan dua SD atau lebih dapat digabung menjadi satu pengelolaan/institusi sekolah dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Pertama Kriteria Teknis Pendidikan. Penetapan perlu tidaknya suatu penggabungan (regrouping) SD ditentukan oleh kriteria teknis pendidikan dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Daya Tampung (DT) SD/ sederajat yang pada tingkat desa/kelurahan merupakan indikator makro yang memperkirakan adanya kelebihan atau kekurangan gedung sekolah/ruang kelas.
 - b) Rasio jumlah murid (JM) per kelas (rata-rata pada satu SD)

merupakan indikator mikro perlu tidaknya suatu SD mengikuti proses penggabungan (regrouping).

- c) Jumlah murid (JM) dalam pendataan 3 tahun terakhir tidak memenuhi jumlah minimal murid yaitu JM kurang dari tiga ratus enam puluh (360) untuk tipe A ($75\% \times 480$), JM kurang dari seratus delapan puluh (180) untuk tipe B ($75\% \times 240$), atau JM kurang dari enam puluh (60) untuk tipe C ($67\% \times 90$).
- d) Dalam satu kompleks SD terdapat lebih dari satu lembaga/institusi SD.

2) Kedua, Kriteria Bangunan Gedung Sekolah Dasar. Kriteria teknis bangunan gedung SD digunakan 60 untuk menentukan lokasi penggabungan bagi SD yang telah diputuskan untuk digabung berdasar kriteria teknis pendidikan, serta pertimbangan untuk penataan fisik gedung SD dan lingkungannya. Kriteria Tata Bangunan dan Lingkungan:

- 1) Lokasi SD sudah tidak sesuai dengan pola tata ruang kota dan peruntukannya, terkena rencana penataan kota, penataan bangunan dan lingkungan, atau sudah tidak layak lagi menjadi tempat belajar-mengajar.
- 2) Lokasi SD saling bergabung letaknya berada pada satu kompleks, bersebelahan/berdekatan, atau masingmasing SD tersebut berada pada radius tidak lebih dari 1000 m.
- 3) Luas Lahan (LL) lokasi penggabungan harus memenuhi syarat sesuai pembakuan, yaitu gedung SD tidak bertingkat ($LL \geq 2000 \text{ m}^2$ untuk SD Tipe A, $LL \geq 2000 - 3000 \text{ m}^2$ untuk SD Tipe B dan $LL \geq 1000 -$

2000 m² untuk SD Tipe C) dan gedung SD bertingkat ($LL \geq 2000$ m² untuk SD tipe A, atau $LL \geq 1000 - 2000$ m² untuk Tipe SD B);

3) Ketiga, Kriteria Keandalan Bangunan. Keandalan bangunan dinilai dari tingkat kerusakan bangunan sebagai berikut:

- a) Lokasi SD berada pada daerah yang sulit air bersihnya.
- b) Lokasi SD berada pada daerah rawan bencana alam (banjir, longsor, jalur gempa, petir, angin ribut, letusan gunung berapi, dan sebagainya).
- c) Bangunan SD belum memenuhi standar spesifikasi teknis bangunan gedung SD kelas C sesuai karakteristik lokal.

G. Kerangka Berpikir

Sebuah model kerangka pemikiran yang baik, dapat menjelaskan hubungan antara variabel penelitian. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan skemanya sebagai berikut:



(Sumber: dikembangkan oleh peneliti untuk penelitian ini)

Dalam kerangka pikir penelitian di atas digambarkan bahwa penelitian ini menganalisis kebijakan regrouping pada Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Karanglo Lor. Seharusnya, regrouping akan membuat Sekolah Dasar Negeri 1 Karanglo Lor Kelurahan Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo menjadi lebih baik dari sebelumnya.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah merupakan suatu rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu variabel yang menjadi pokok penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka definisi operasional *Kebijakan Regrouping Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Karanglo Lor Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo* adalah:

1. Implementasi

Implementasi dalam penelitian ini adalah tindakan atau pelaksanaan dari Kebijakan Regrouping Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Karanglo Lor Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak terkait Kebijakan Regrouping Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Karanglo Lor Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

3. Regrouping

Regrouping dalam penelitian ini adalah keputusan untuk mengkombinasikan/menggabungkan Sekolah Dasar Negeri 2 Karanglo Lor Ke Sekolah Dasar Negeri 1 Karanglo Lor Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

4. Sekolah Dasar

Sekolah Dasar (disingkat SD) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Sekolah Dasar Negeri 1 Karanglo Lor Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu kerangka kerja untuk melakukan tindakan, atau, suatu kerangka berfikir menyusun gagasan, yang beraturan, terarah, dan berkonteks, yang relevan dengan maksud dan tujuan karena berupa sistem maka metode merupakan seperangkat unsur-unsur yang membentuk satu kesatuan. Dengan demikian maka metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam proses penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian jenis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu secara apa adanya. Penggunaan tipe deskriptif kualitatif dimaksudkan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek yang diteliti (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Untuk mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha untuk mengemukakan gejala secara lengkap didalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan dan kondisinya (Nawawi, 2015). Kemudian hasil deskripsi secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan subyek atau obyek penelitian yang sesungguhnya di lapangan untuk:

- a. Merekonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan;
- b. Merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu;

- c. Memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang;
- d. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan
- e. Memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian mengambil lokasi di SDN Karanglo Lor 1 Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Penelitian dilakukan dari bulan Nopember 2021 – Juli 2022.

3. Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi (Arikunto, 2012: 122). Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Informan dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang Kebijakan Regrouping Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Karanglo Lor Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Teknik pemilihan informan yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penunjukkan seseorang dengan sengaja yang dianggap tahu permasalahan yang sedang diteliti untuk memperoleh yang benar atau dan terpercaya.

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung dalam penelitian, yaitu:

- a. Ketua Komite SDN 1 Karanglo Lor;
- b. Kepala SDN 1 Karanglo Lor
- c. Panitia *Regrouping* Kabupaten
- d. Guru dan Staf Pegawai SDN 1 Karanglo Lor

e. Tokoh Masyarakat Karanglo Lor

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, agar dapat membuat sebuah simpulan, diperlukan serangkaian data yang mendukung. Tentu saja aktivitas ini membutuhkan sebuah proses pengumpulan data dari subjek yang tepat serta hasil penelitiannya bisa dipertanggungjawabkan (Nasir, 2012, hal 98).

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara Mendalam (*Indepth-Interview*)

Wawancara Mendalam yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan. Wawancara di sini bermakna bahwa antara *interviewer* dengan responden saling berhadapan langsung dan dimungkinkan responden dalam wawancara dapat berbentuk sebagai orang tunggal maupun dua orang atau lebih. Di samping itu wawancara tersebut akan digunakan untuk memverifikasi dan memperluas data/informasi yang telah diperoleh sebelumnya..

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang ada. Pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan seseorang yang menjadi sasaran penulis, tanpa mengakibatkan perubahan aktivitas pada kegiatan yang bersangkutan. Teknik pengamatan ini didasarkan pada pengalaman secara langsung (Nasir, 2012, hal 101).

c. Dokumentasi

Metode ini salah satu metode pengumpulan data yang digunakan

dalam metodologi penelitian sosial yang berupa arsip dan dokumen baik yang berada di suatu instansi atau kantor, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Teknis dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, kabar, majalah dan sebagainya (Nasir, 2012; 132).

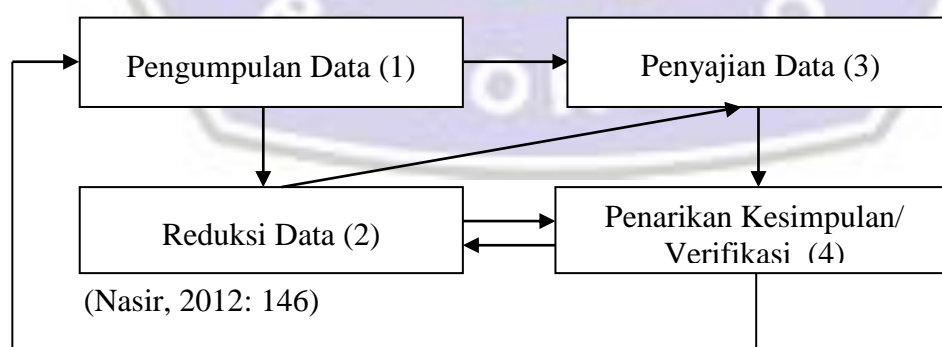
5. Analisis Data

Dalam penelitian ini tehnik analisa data kualitatif yaitu data yang telah diperoleh dianalisa melakukan penggalian yang secara mendalam. Analisa data kualitatif prosesnya ada berbagai cara yaitu mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu di beri kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. Dan juga berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola, atau hubungan-hubungan. (Nasir, 2012, hal 100).

Secara ringkas proses analisa data dapat digambarkan sebagai berikut (Huberman dan Miles dalam Nasir, 2012, hal 101)

Gambar 1.1

Skema Analisis Data Penelitian



Dalam model interaksi, tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaksi. Reduksi data,

penyajian data, dan penarikan data tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Huberman dan Miles dalam Nasir, 2012) seperti gambar di atas.

Dengan sendirinya peneliti harus memiliki kesiapan untuk bergerak aktif di antara ke empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data. Selanjutnya bergerak bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama penelitian berlangsung.

Dengan begitu, analisis ini merupakan sebuah proses yang berulang dan berkelanjutan secara terus-menerus dan saling menyusul. Kegiatan keempatnya berlangsung selama dan setelah proses pengambilan data berlangsung. Kegiatan ini baru berhenti saat penulis akhir penelitian telah siap dikerjakan.

Berikut ini paparan masing-masing proses secara selintas.

a. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap sebelumnya yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan (Krisyantono, 2009: 148)

b. Tahap reduksi data

Tahap reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dibutuhkan, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analisis.

Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi (Krisyantono. 2009: 150).

c. Penyajian data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. (Krisyantono. 2009: 151)

d. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat) (Krisyantono. 2009: 151).

Dari pengertian di atas diketahui urutan analisis data adalah; melalui tahap pengumpulan data, menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dengan

pendekatan deskriptif kualitatif yaitu cara berfikir induktif dimulai dari analisis data yang terhimpun untuk kemudian ditarik kesimpulan.

